PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 05 Juni 2025 Halaman: 3

Warga Berharap Atensi Presiden

KAI Kembali Peringatkan Masyarakat Tegal Lempuyangan Segera Kosongkan Laha

YOGYA, TRIBUN - Daniel Sunardjo, warga terdampak proyek beautifikasi Stasiun Lempuyangan, Kota Yogya, mengadu ke Presiden RI, Prabowo Subianto. Aduan tersebut disampaikan pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesi (KAI) berusia 86 tahun itu, melalui secarik surat yang dikirimkan via Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (4/6) siang.

Sebagai informasi, PT KAI berencana melakukan beautifikasi Stasiun Lempuyangan yang berdampak terhadap 14 bangunan berupa eks bangunan dinas dan rumah dinas di Tegal Lempuyangan. Warga merasa berhak atas tanah yang mereka tempati karena memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 2018.

Sementara itu, PT KAI mengeklaim memiliki *serat pallilah* yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta, GKR Mangkubumi, pada Oktober 2024. Serat tersebut memiliki jangka waktu satu tahun untuk diproses menjadi *serat kekancingan*.

Sunardjo merupakan mantan karyawan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun kisaran tahun 1994 silam. Jabatan tertinggi yang pernah diembannya adalah Kepala Urusan Kelistrikan se-Jawa, di Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) Wilayah Usaha Jawa.

Sebagai saksi sejarah *perkeretaapian Indonesia*, dengan masa pengabdian mencapai 33 tahun, Sunardjo kini merasa diremehkan. Bukan tanpa alasan, ganti rugi yang ditawarkan PT KAI untuk bangunan yang ditempatinya jauh lebih kecil, jika dibandingkan 13 rumah warga lainnya.

Sebagai informasi, PT KAI hanya bersedia memberi santunan Rp21 juta untuk bangunan berluas 80 meter persegi yang ditempatinya sejak 1978 itu. Padahal, kondisi sekarang, Sunardjo merupakan satu-satunya pensiunan PT KAI yang masih tersisa, di permukiman di sisi utara stasiun tersebut.

"Maka, saya mengirimkan surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Bahasa Jawanya, saya *nyuwun kawelasan*. Saya berharap keadilan," tandasnya.

Oleh sebab itu, ia yang menyambangi Kantor Pos didampingi salah satu putrinya, mempertanyakan proses pengukuran yang dilakukan PT KAI di huniannya. Pasalnya, pembenahan demi pembenahan sudah dilakukannya agar rumah tetap berdiri dan layak ditempati, termasuk saat terjadi deretan bencana alam di Yogyakarta.

"Rasanya, saya setelah pensiun, tidak dipakai, kok digusur begitu saja, dengan pesangon hanya Rp21 juta oleh PT KAI. Kami masih menunggu jawaban, apakah bisa mengajukan, jangan sekian, mohon perhitungan ulang. Saya ganti rugi nya paling rendah, hanya Rp21 juta. Lainnya ada yang Rp100 juta, kemudian Rp50 juta lebih. Itu tidak manusiawi. Saya penstunan, kok seperti diremehkan," uraiinya.

Surat peringatan

Namun, bukannya mendapat jawaban, Sunardjo dan warga terdampak lainnya malah mendapat surat peringatan (SP) kedua per awal Juni 2025, untuk segera angkat kaki. Sebelumnya, PT KAI juga telah mengirimkan surat peringatanpertama pada 21 Mei. Sunardjo berharap, Presiden Prabowo bisa memberikan atensi serius, demi terwujudnya rasa keadilan untuk masyarakat.

"Harapannya, Pak Prabowo bisa menggerakkan PT KAI, supaya manusia-manusia yang tergusur ini mendapat perhatian layak dari pemerintah," ungkapnya.

Surat peringatan kedua itu berisi perintah agar warga membongkar sendiri bangunan tambahan yang diklaim sebagai aset PT KAI, paling lambat tujuh hari sejak surat diterima. Surat bertanggal 1 Juni 2025 dengan nomor KA.203/VI/1/DO.6-2025 itu ditandatangani Deputi Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta, Nugroho Dwi Sasongko. Dalam salah satu poinnya, PT KAI memperingatkan bahwa apabila pengosongan tidak dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, penertiban akan dilaksanakan secara sepihak oleh perusahaan.

"KAI Daop 6 melaksanakan sesuai prosedur yang ada di perusahaan. Kita sudah melaksanakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai prosedur kita mengirimkan surat peringatan 1, dilanjutkan dengan surat peringatan 2 dan 3 sebelum dilakukan penertiban," ujar Kepala Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih. **(aka/han)**

MENCARI KEADILAN

- PT Kereta Api Indonesia mengirimkan surat peringatan kedua bagi warga Tegal Lempuyangan, Kota Yogya, untuk segera mengosongkan lahan.
- Hal itu sehubungan dengan proyek beautifikasi Stasiun Lempuyangan yang berdampak terhadap 14 bangunan yang kini ditinggali warga.
- Sebagian warga menilai ganti rugi yang ditawarkan PT KAI terlalu kecil, serta berharap ada perhatian pemerintah dalam perkara ini.



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

KIRIM SURAT - Daniel Sunardjo, warga terdampak proyek beautifikasi Stasiun Lempuyangan, saat mengirimkan surat aduan ke Presiden Prabowo, di Kantor Pos Besar Yogya, Rabu (4/6).

Kinanti Hadirkan Layanan P

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005